

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan atas olah data penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi di lima provinsi dengan investasi terendah di Indonesia periode 2013-2022. Hal ini dikarenakan bahwa meskipun ekonomi secara keseluruhan sedang tumbuh, peningkatan ini tidak cukup untuk menarik investasi. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh faktor-faktor yang tidak merata di seluruh sektor ekonomi serta tergolong tidak menarik bagi para investor.
2. Variabel IPM secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di lima provinsi dengan investasi terendah di Indonesia periode 2013-2022. Peningkatan dalam IPM sering kali mencerminkan peningkatan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan, yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Tenaga kerja yang lebih terampil lebih mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi operasional, yang sangat menarik bagi investor.
3. Variabel Infrastruktur secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di lima provinsi dengan investasi terendah di Indonesia periode 2013-2022. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan transportasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan barang

dan jasa dengan lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan margin keuntungan. Investor tertarik pada lingkungan di mana biaya operasional dapat ditekan seminimal mungkin.

4. Stabilitas politik secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi di lima provinsi dengan investasi terendah di Indonesia periode 2013-2022. Investor memiliki persepsi yang lebih optimis terhadap risiko politik yang terkait dengan penurunan stabilitas politik. Investor percaya bahwa kondisi tersebut sementara dan dapat diatasi, atau bahwa potensi keuntungan dari investasi di negara tersebut lebih besar daripada risiko yang dihadapi. Akan tetapi hal tersebut juga masuk kedalam perhitungan matang investor sehingga para investor mengambil langkah hati-hati dalam berinvestasi, sehingga investasi yang naik atas turunya stabilitas politik tidak naik secara signifikan.

B. Implikasi

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan DI Yogyakarta seharusnya melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara merata dan mengurangi kesenjangan antara sektor-sektor ekonomi, pemerintah dapat mengambil berbagai langkah strategis. Berdasarkan data banyak sektor yang telah berkontribusi dalam perekonomian kelima provinsi tersebut akan tetapi masih banyak sektor yang perlu ditingkatkan.

Perekonomian kelima provinsi masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun pengelolaan ketiga sektor tersebut belum optimal. Selain itu perlu dikembangkan potensi dari sektor lain, seperti pada industri pengelolaan berbasis UMKM. Namun terbatasnya akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan dan belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam mengembangkan sektor UMKM menjadi kendala tersendiri untuk kemajuan industri tersebut di Sulbar. Pemda di wilayah Sulbar diharapkan dapat membantu sosialisasi program-program pendanaan UMKM seperti Kredit Usaha Rakyat dan UMi atau program lainnya.

Mayoritas dikelima provinsi juga masih kurang dalam sektor pariwisata hal ini bisa ditingkatkan dengan pengembangan infrastruktur pariwisata seperti transportasi dan akomodasi harus diperbaiki dan diperluas. Promosi yang efektif baik secara lokal maupun internasional perlu dilakukan melalui media sosial, website, dan kerjasama dengan agen pariwisata serta media massa. Dan terakhir diversifikasi produk pariwisata agar menawarkan beragam pengalaman seperti wisata budaya, alam, sejarah, olahraga ekstrem, atau kuliner

2. Pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan DI Yogyakarta seharusnya lebih fokus dalam meningkatkan pembangunan manusianya. Prioritaskan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah perlu membangun fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh

pemerintah bisa membangun sekolah di daerah-daerah terpencil agar semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Langkah lain adalah pemantauan program Dana BOS agar terhindar dari praktik korupsi sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai yaitu menyediakan bantuan sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi orang tua siswa. Pemaksimalan pemanfaatan KIP juga perlu dilakukan, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan dana KIP digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian program KIP berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari penerima manfaat, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya.

Selain infrastruktur di bidang pendidikan pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap wilayah sehingga masyarakat mendapat akses kesehatan yang baik hal ini bisa dilakukan dengan membangun layanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil. Langkah lain yang dapat diambil ialah dengan pemaksimalan Kartu Indonesia Sehat dengan cara memastikan informasi mengenai KIS mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk di daerah terpencil, melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat, memperbarui data penerima KIS secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencapai orang-orang yang benar-benar membutuhkan, melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan layanan kesehatan yang didanai oleh KIS digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.

3. Pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan DI Yogyakarta seharusnya menyusun rencana pembangunan infrastruktur jalan raya yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan sosial. Rencana ini harus memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas, arus logistik, dan aksesibilitas wilayah-wilayah strategis. Pastikan bahwa pembangunan jalan raya dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi dan memadai. Jalan raya yang baik akan meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan demikian akan mengurangi biaya operasional yang akan dikeluarkan investor karena ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya salah satunya dengan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol memiliki berbagai manfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Jalan tol meningkatkan konektivitas antar wilayah, memudahkan akses dan pergerakan orang serta barang dari satu tempat ke tempat lain. Dengan adanya jalan tol, waktu tempuh perjalanan dapat dipersingkat karena jalan tol umumnya memiliki lebih sedikit hambatan dibandingkan jalan biasa. Selain itu, jalan tol membantu meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan harga barang menjadi lebih kompetitif. Infrastruktur yang baik seperti jalan tol dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah yang dilalui, karena akses yang lebih baik akan menarik investasi dan mengembangkan sektor pariwisata serta industri lokal.

Jalan tol biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan standar keselamatan yang lebih baik dibandingkan jalan biasa, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dengan adanya jalan tol, beban lalu lintas pada jalan-jalan utama di perkotaan dapat berkurang, sehingga kemacetan dapat diminimalkan. Pembangunan jalan tol sering kali diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya, seperti pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri.

4. Pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan DI Yogyakarta seharusnya perlu menjaga konsistensi dalam kebijakan politik dan ekonomi. Perubahan yang terlalu sering atau mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan investor. Pemerintah perlu menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat untuk mempunyai kebebasan dalam berkumpul, berpendapat dan berkeyakinan. Salah satu caranya ialah membuat seluruh umat beragama merasakan kenyamanan memeluk agamanya di Indonesia sebagai contoh dengan mempermudah izin pembangunan tempat ibadah. Pemerintah bisa meningkatkan peran DPRD dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan, menginisiasi perda, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran Bawaslu demi kelancaran pemilu. Pemerintah juga dapat meningkatkan peran peradilan, karena masih terjadi penghentian penyelidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Pemerintah juga harus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat karena banyaknya kritik dan ketidakpercayaan masyarakat

terhadap lembaga-lembaga demokrasi yang membuat masyarakat menjadi apatis dan masa bodoh terhadap kebijakan yang ditetapkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu pada periode penelitian terdapat fenomena covid-19 yang dapat mengganggu data karena terjadi fluktuasi yang signifikan, diharapkan penelitian selanjutnya memperpanjang periode waktu penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahkan variabel yang dapat diuji pengaruhnya terhadap investasi sebagai contoh variabel sosial budaya.

